

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 12, 18 DAN 20 APRIL 2016



TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

Hari : SELASA
Tanggal : 12 April 2015
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- VI. **JUMLAH ANGGOTA**
1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang

2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	: 6 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

- | | |
|-------------------|--|
| Yang terhormat | Bupati dan Wakil Bupati Rembang |
| Yang sayahormati | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Rembang. |
| Yang saya hormati | Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang. |
| Yang saya hormati | Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Para Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan
dan semua undangan lainnya yang berbahagia. |

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2016 kita masih berkesempatan menghadiri untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 merupakan implementasi dari : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan :

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk ketentuan tersebut, DPRD Kabupaten Rembang telah memberitahukan kepada Bupati Rembang terkait penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 melalui surat Nomor : 170/145/2016 Tanggal 18 Maret 2016, dan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD, lewat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 130.04/0506/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang. Kami segenap

pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya - besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang dengan tepat waktu telah menyampaikan LKPD Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 38 orang. Dengan demikian, kuorum dalam Rapat Paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 6 April 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan,
2. Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Kepada Bupati Rembang Saudara H. ABDUL HAFIDZ dipersilahkan.

**====PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR T.A
2015=====**

➤ *(Ringkasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015
terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Selanjutnya LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 ini nantinya akan dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD pada hari Senin tanggal 18 April 2016. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Rembang di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tugas dan sasaran pembangunan. Untuk itu saya berharap kepada rekan-rekan anggota Komisi agar jeli dan teliti dalam melakukan pendalaman terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015.

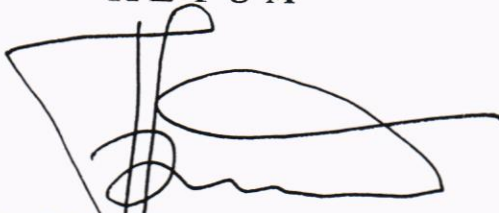
Tanpa terasa agenda dalam Rapat Paripurna telah kita lalui dengan baik, maka selesai sudah Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Akhirnya dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin**” tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AHKIR TAHUN ANGGARAN 2015**

**HARI/TANGGAL : SELASA , 12 APRIL 2016
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWL, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KEI
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	a
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	n
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	44	

Ceterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

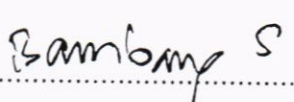
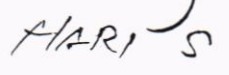
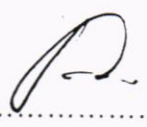
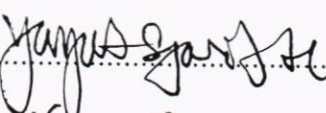
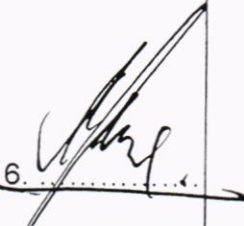
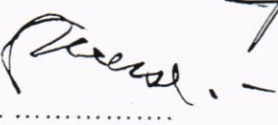


DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA,

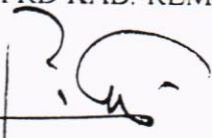
H. MAJID KAMIL, MZ

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AHKIR TAHUN ANGGARAN 2015

HARI/TANGGAL : SELASA, 12 APRIL 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2		Kejaksaan Negeri Rembang	2. 
3	 	Pengadilan Negeri Rembang	3. 
4		Dandim 0720 Rembang	4.
5		Kepolisian Resort Rembang	5. 
6		Pengadilan Agama Kab. Rembang	6. 
7	Ir. HARI SUSANTO, M.Si	Pj Sekertaris Daerah	7. 



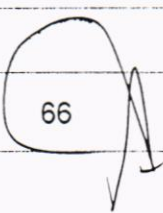
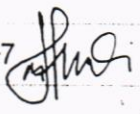
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AHKIR TAHUN ANGGARAN 2015

HARI/TANGGAL : SELASA, 12 APRIL 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wan Effendi	Staf	1
2	STAF AHLI BUPATI	Warfowo	---	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhmad		8
9	BAG. HUKUM	Edy Djoko P	Bag.	9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gunarto	Bag. Adm. Pab	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	ISMUGROHO	Bag. Sub.	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Muhammad	Bag.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Joko Supriyanto	Staf	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	Nur Sukriati	Staf	17
18	INSPEKTORAT	Djono P	Sekretaris	18
19	BAPPEDA	DNP	Sekretaris	19
20	BPMPKB	IGAT IKI	Staf	20
21	B K D	Suparman		21
22	BKP & P4K	Wuryanto	Staf	22
23	B.P B D	Anjar	Staf	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	M. Mulya	Staf	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Staf	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Nash Effendi	Staf	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	M. Mulya	Staf	27
28	DINTANHUT	Suratman	Staf	28
29	DINLUTKAN	Suparman	Staf	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL	H. H. Paelini	Kadis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	A. WALUYO	KADIS	32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryon	Sebetmas	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanto		35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Romly	Kas	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Dinar. Iwikantini	Staf Perpust.	37
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyanti	KPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	H. E. Sugiyanti	Kabang TV	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Kp. Slamet Sud ag		41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihombing	Ka. UNIT	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Agus Setyo Budi	WK. Pin cat	45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Y. Haryadi	Gara Kahlili	50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SAICHUN	Ka	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	K. Haryadi	L. Haryadi	54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)	NOOTO	KEPALA	63 
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65 
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Swir	Se kr	66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	Bag Tapa	Henni Sheta	Ragb	95 

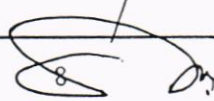
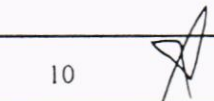
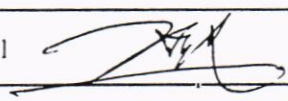
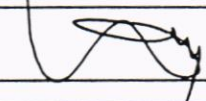
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Staf PUS	Agus w		96
97	Bagi Dyren	Agus Cah		97
98	FAHRUDIN	WSP		98
99	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTOR	99
100	Eko Ardiyanto/Ayuda	Eko Ardiyanto		100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AHKIR TAHUN ANGGARAN 2015

HARI/TANGGAL : SELASA, 12 APRIL 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Sulim	1 
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2 
3	CAMAT SUMBER	M. Nur Chandi	3 
4	CAMAT SULANG	1	4
5	CAMAT BULU		5 
6	CAMAT PAMOTAN	Mr. Wiyoto	6 
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kusni	8 
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Iswanto	10 
11	CAMAT SEDAN	Iswanto	11 
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13 
14	CAMAT SARANG	Eddy Kurniyo	14 



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015

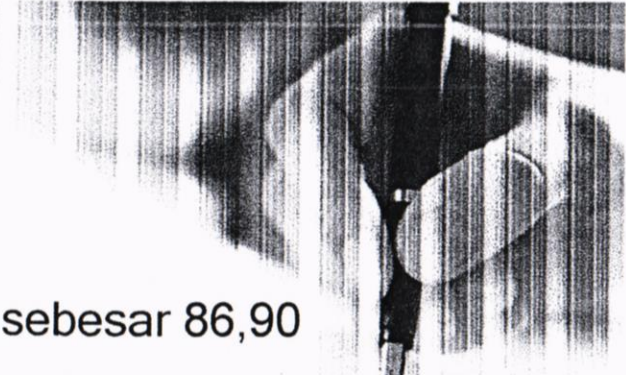
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DI KABUPATEN REMBANG

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 5,15 % yg dpt diartikan bahwa kondisi perekonomian di Kab. Rembang relatif stabil.
- Angka inflasi dapat terkendali pada kisaran angka di bawah dua digit yaitu 6,51 % yg menunjukkan tingkat kestabilan harga barang & jasa.
- Indeks gini rasio sebesar 0,33 yang berarti distribusi pendapatan masyarakat relatif merata & dapat dikategorikan sbg ketimpangan rendah
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 67,40 yg didukung oleh adanya peningkatan komponen-komponen penyusunnya seperti usia harapan hidup (UHH) sebesar 74,19 dan angka melek huruf sebesar 94,74%.

2. ASPEK PELAYANAN UMUM

- angka partisipasi murni pendidikan dasar yaitu SD/MI sebesar 86,90 SMP/MTs sebesar 76,50 dan untuk pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA sebesar 48,12
- cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan sebesar 99,96%,
- cakupan desa imunisasi anak (UCI) mencapai 100%,
- cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin berupa kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 mencapai 78,31%.
- proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 44,96 %
- proporsi daerah irigasi baik mencapai 77,88 %
- proporsi rumah layak huni sebesar 70,71 %
- proporsi rumah tangga pengguna air bersih sebesar 67,48 %



3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

- PDRB Kab. Rembang Atas dasar harga konstan 2010 telah mencapai nilai 10,282 trilyun rupiah yang terdistribusi dalam 17 sektor lapangan usaha.
- Keberhasilan pembangunan sektor pertanian sebagai kontributor ekonomi terbesar yang dapat diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) tahun terakhir telah mencapai angka 100,15 yang mencerminkan indeks kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan usaha taninya

Kondisi daya saing daerah juga ditunjang iklim investasi yang semakin kondusif dengan perbaikan pelayanan perijinan usaha serta relatif terkendalinya gangguan keamanan sehingga mampu memberikan jaminan dan kepastian investasi di Kabupaten Rembang.

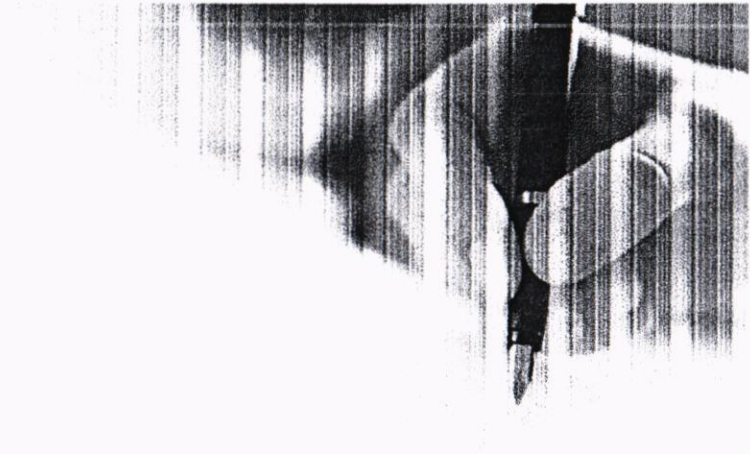




4. ASPEK KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selama satu tahun terakhir situasi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif kondusif sebagai cerminan karakter masyarakat Rembang yang penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Indikator keamanan dan ketertiban dapat kita rasakan pada situasi dan kondisi wilayah yang tetap terjaga, aman dan tenteram untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keberlanjutan pembangunan serta kehidupan berdemokrasi yang damai, terutama di saat pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada Tahun 2015.



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, secara lebih utuh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 ini akan Saya sampaikan gambaran ringkas penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan urusan wajib dan pilihan

BIDANG PENDIDIKAN

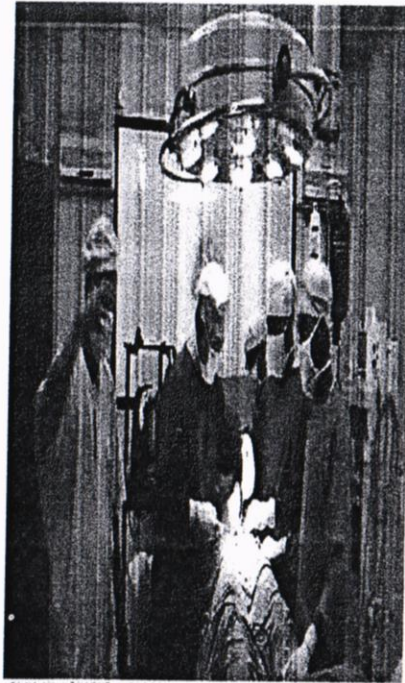
1. Angka melek huruf mencapai 94,74 %
2. Angka Kelulusan mencapai 100 % di semua tingkatan baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA
3. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100,69 % sedangkan di tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 86,24 %
4. Angka Putus Sekolah SD/MI mencapai 0,02 %
SMP/MTs mencapai 0,19 % dan SMA/SMK/MA mencapai 0,42 %
5. Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 93,73 %
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 87,12 %



BIDANG KESEHATAN

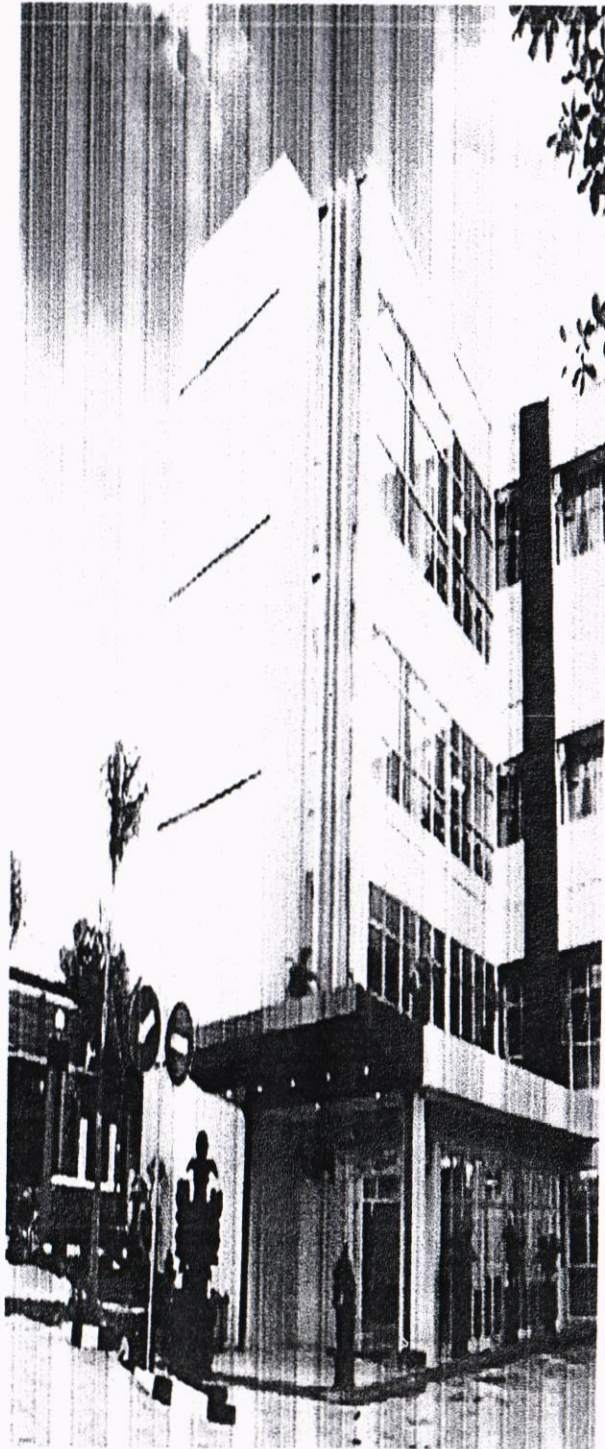


- Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani mencapai 100%
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 100%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 66,3 %
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%
- Cakupan kunjungan bayi mencapai sebesar 93,85 %



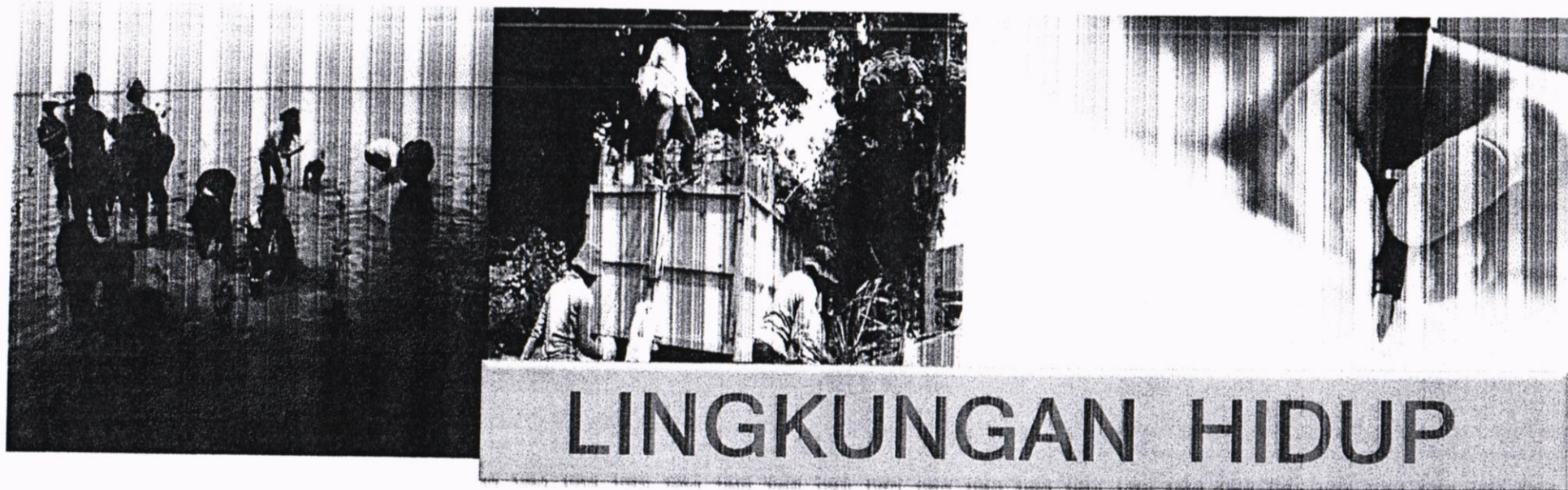
Adapun capaian kinerja mutu pelayanan rumah sakit tahun 2015 meliputi :

1. Angka keterlambatan pelayanan Pertama Gawat Darurat mencapai 0% atau semua pasien tidak terlambat mendapatkan pelayanan pertama gawat darurat.
2. Angka Pasien dengan Dekubitus mencapai 0,06 %
3. Angka Kejadian Infeksi dengan Jarum Infus mencapai 1,42 % (masih berada dibawah standar maksimal 7 %).
4. Angka Kematian Pasien Gawat Darurat mencapai 0,4 % (masih berada dibawah standar maksimal 1%).
5. Angka Masa Tunggu Sebelum Operasi Elektif (AMSOE) mencapai 0 %
6. Infeksi Luka Operasi mencapai 0,47 %
7. Angka Sectio Caesarea mencapai 31,28%, sedangkan target maksimal 20%.
8. Angka Kematian Ibu Karena Perdarahan (AKIP) mencapai 1,1 %
9. Angka Kematian Pasien Rawat Inap Intensif (ICU) mencapai 1,88 %
10. Angka Kematian karena Eklamsia mencapai 2,63 %.



Sedangkan capaian kinerja tingkat pemanfaatan sarana pelayanan rumah sakit tahun 2015 meliputi :

1. Rata-Rata Kunjungan Poliklinik Per Hari mencapai 286 kunjungan
2. Kebutuhan air minum dan air bersih rumah sakit mencapai 32.472 m³.
3. Prosentase item obat yg tersedia terhadap item obat dalam formularium mencapai 100%.
4. Rata-rata persalinan per hari mencapai 6 persalinan.
5. Gizi (Prosentase Penyediaan Makanan Khusus) mencapai 100% atau sudah tercukupi penyediaan makanan khusus.
6. Radiologi (Prosentase Pemeriksaan dari Luar Rumah Sakit) mencapai 13,54 %
7. Angka Ketidaklengkapan Pengisian Catatan Medis mencapai 13,54 %.
8. Laboratorium (rata-rata jumlah pemeriksaan per hari) mencapai- 1.067 pemeriksaan
9. Bank Darah (pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit) mencapai 100% yang berarti sudah tercukupi pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit.

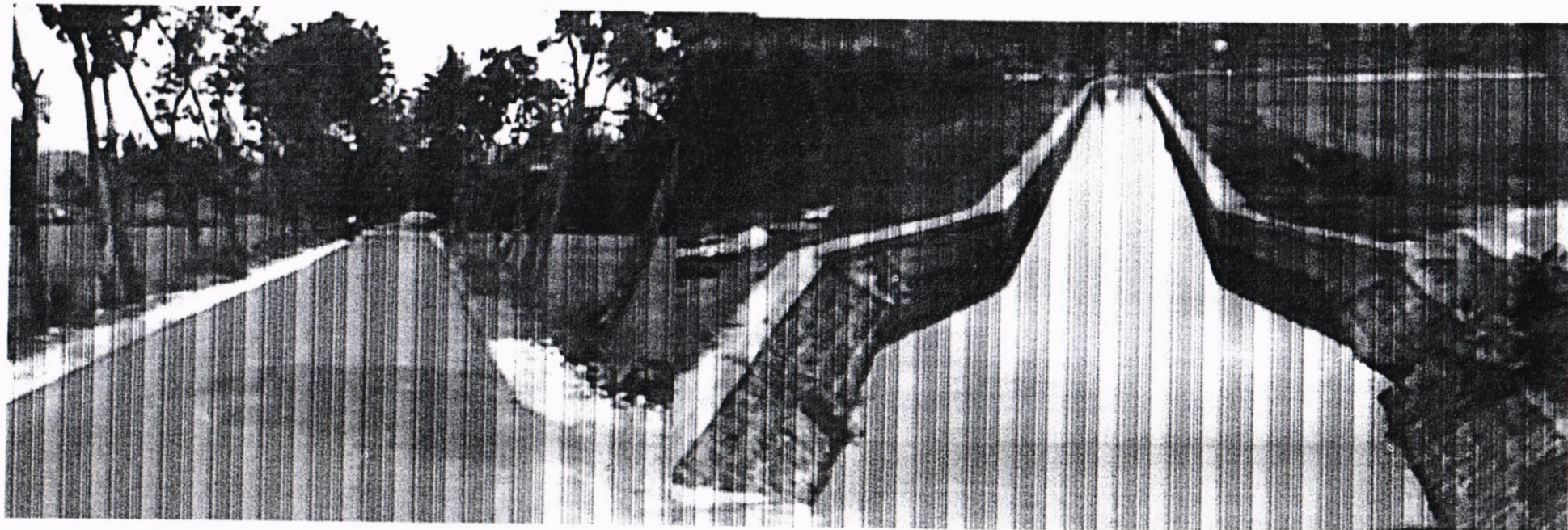


- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% dari jumlah 5 perusahaan wajib AMDAL
- Penegakan hukum lingkungan sebesar 100% dari 5 kasus lingkungan yang ada
- Penanganan sampah sebesar 20,29 % dengan volume 381,3 m³ dari total volume produksi sampah 1.878,8m³.
- Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) perseribu penduduk mencapai 0,25 dengan proporsi jumlah daya tampung TPS 152 m³ dari jumlah penduduk (619.091 jiwa).

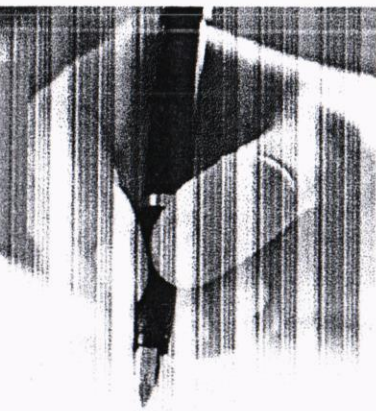
PEKERJAAN UMUM

Kondisi Jalan Kabupaten dan Irigasi Tahun 2015

- panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 44,96 % atau sepanjang 288,95 km dari total jalan sepanjang 642,75 km,
- proporsi daerah irigasi dalam kondisi baik mencapai 77,88 % atau seluas 16.505,45 hektar dari total daerah irigasi seluas 21.193,45 hektar



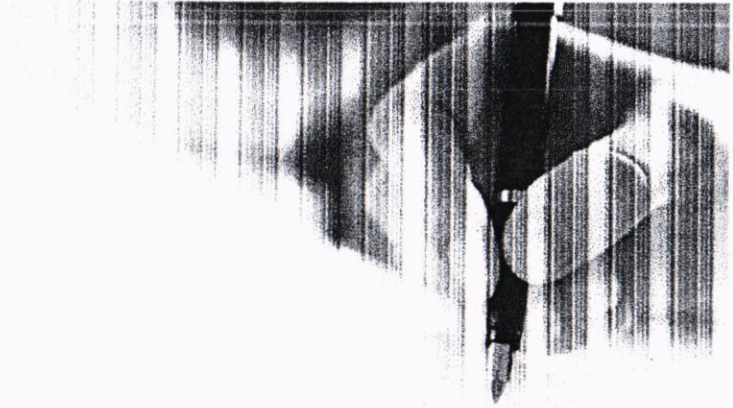
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Indikator Kinerja :

- Tersedianya Dokumen RKPD yg ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.
- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 98 % atau sejumlah 217 program RKPD dari 220 program yang ada di RPJMD

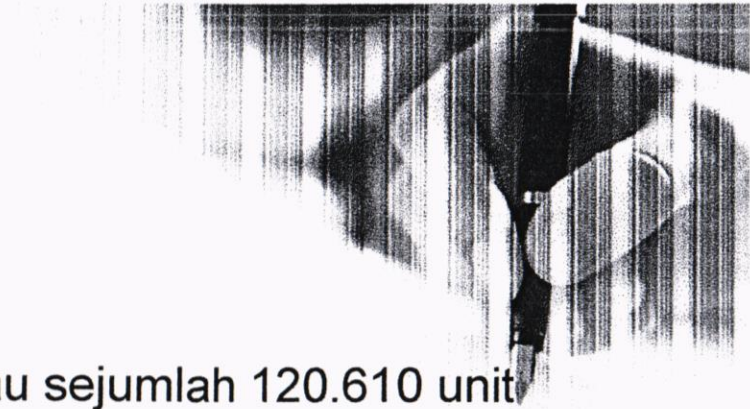
PENATAAN RUANG



Kinerja penataan ruang terlihat pada ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per luas wilayah perkotaan mencapai 7,77 % dengan proporsi Luas RTH 660,958 hektar dari Luas ber HPL/ HGB 8.502,717 Ha.

Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan pembahasan forum BKPRD dalam rangka penerbitan rekomendasi BKPRD sebanyak 34 buah atau meningkat 70% dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 20 rekomendasi. Hal ini mengindikasikan kondisi investasi di Kabupaten Rembang semakin baik

PERUMAHAN



- Proporsi rumah layak huni mencapai 70,71 % atau sejumlah 120.610 unit dari jumlah seluruh rumah 170.566 unit.
- Proporsi rumah tangga pengguna air bersih sebesar 67,48 % atau sejumlah 126.716 rumah tangga dari jumlah total rumah tangga 187.783.
- Proporsi rumah tangga bersanitasi mencapai 79,89 % atau sejumlah 150.018 rumah tangga dari jumlah 187.783 rumah tangga.
- Rasio rumah ber-IMB mencapai 2,35 % yaitu proporsi jumlah rumah ber-IMB 4.420 unit dari jumlah rumah seluruhnya 187.783 unit.
- Kawasan Kumuh sebesar 0,11 % yaitu proporsi luas kawasan kumuh 114,407 hektar dari total luas permukiman 101.408,035 hektar

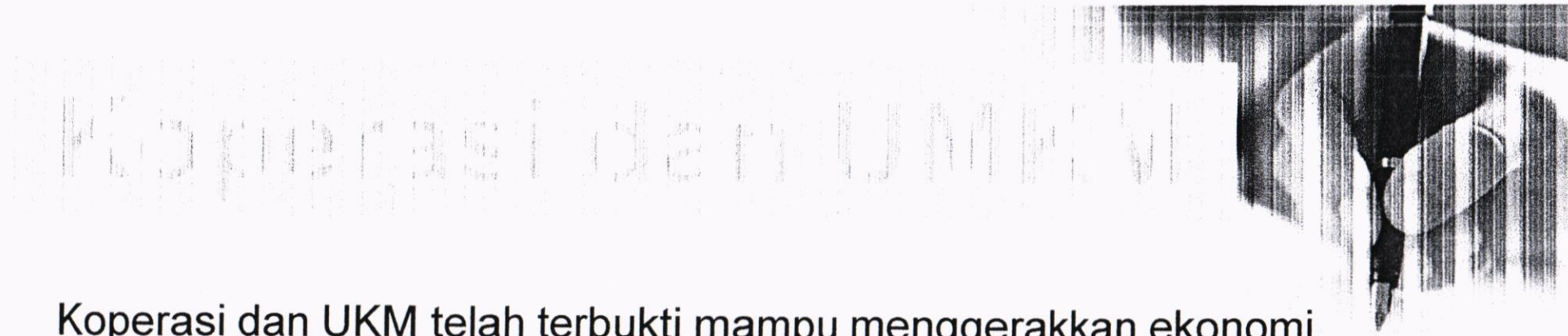


KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif dengan karakter kebangsaan yang kuat, guna menciptakan sumber daya manusia yang sportif dan berprestasi

Sarana prasarana yang tersedia di tahun 2015

- Gelanggang/balai remaja milik pemerintah sejumlah 2 buah
- Lapangan olah raga pada mencapai 627



Koperasi dan UKM telah terbukti mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, sekaligus mampu menjadi soko guru perekonomian nasional dan daerah. Koperasi dan kelompok-kelompok UKM yang ada akan terus Kita lakukan penguatan guna mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh.

- Jumlah Koperasi aktif mencapai mencapai 447 unit atau 78,84 % dari jumlah koperasi sebanyak 567 unit.
- Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 37.513 atau 95,30% dari jumlah seluruh UKM sebanyak 39.363 unit

PENANAMAN MODAL

- Jumlah realisasi ijin investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 75% dengan diterbitkannya 7 ijin dari tahun sebelumnya sebanyak 4 ijin
- Nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 812,26% yaitu mencapai Rp. 3.313.033.363.082,- dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 363.167.163.497,-.
- Nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) mengalami peningkatan sebesar 34,35% yaitu mencapai Rp. 165.685.052.800,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 123.321.550.780,-

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- Jumlah penduduk yg sudah terekam e-KTP mencapai 443.084 orang atau 92,05 % dari 481.370 penduduk wajib KTP.
- Jumlah penduduk yg memiliki KTP sebanyak 427.223 orang
- Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 44.911 lembar
- Penerbitan akta kematian sebanyak 379 lembar
- Kepemilikan akta kelahiran sebanyak 427.423 orang

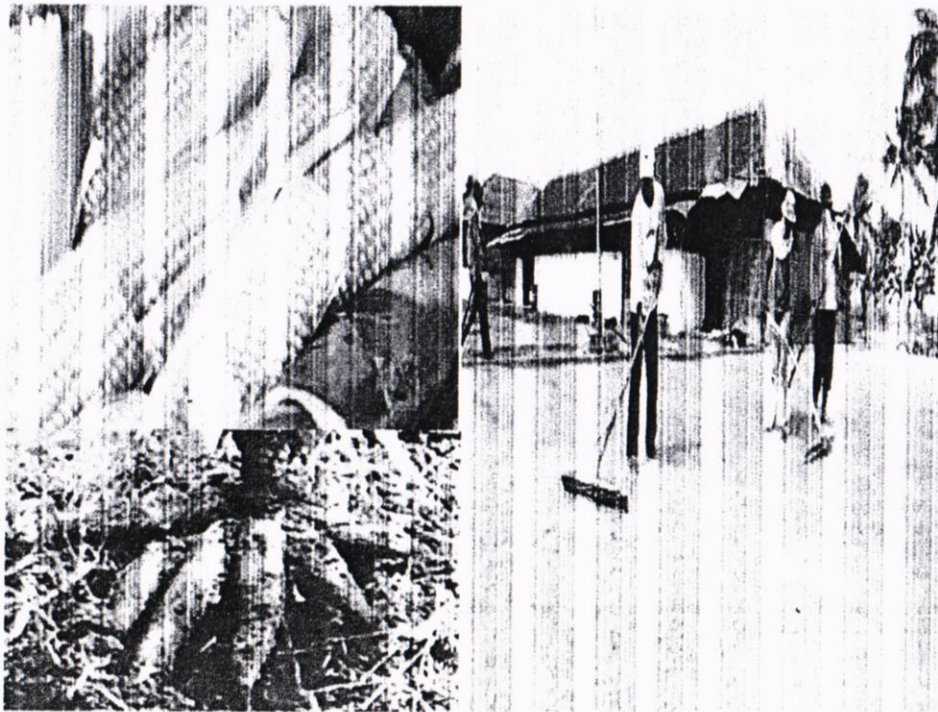
KETENAGAKERJAAN

- Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh (peserta jamsostek aktif) sebanyak sebesar 3.330 pekerja/buruh atau 23,97 % dari 13.889 pekerja/buruh.
- Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 845 pekerja atau 69% dari 1.216 pendaftar kerja

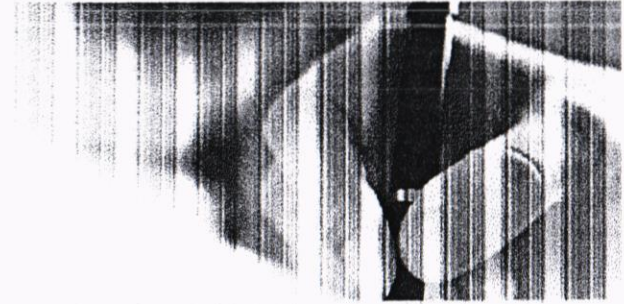
KETAHANAN PANGAN

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kab. Rembang diarahkan pada upaya mengembangkan sistem database perencanaan dan ketersediaan informasi ketahanan pangan, serta melaksanakan analisa ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Ketersediaan pangan utama per seribu penduduk mencapai 206.694 kg



- Padi : 127.962,72 ton
- Jagung : 102.962,61 ton
- Kedelai : 4.024,38 ton
- Ubi kayu : 36.742,54 ton
- Ubi jalar : 1.759,18 ton



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 2,78% atau 3.615 dari 130.204 pekerja perempuan
- Angka melek huruf perempuan usia di atas 15 th mencapai 91,37% atau 63.149 dari 69.114 perempuan di kelompok usia tersebut
- Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 61,96 % atau mencapai 87.449 dari total 141.138 angkatan kerja perempuan.

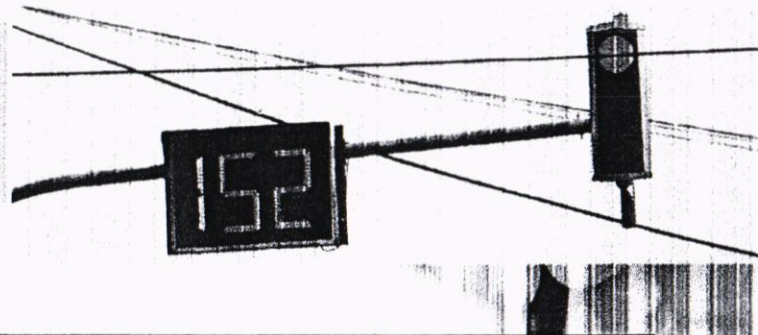
KB DAN KELUARGA SEJAHTERA



Prevalensi peserta KB aktif mencapai 83,57 %

- Peserta program KB aktif sebanyak 110.660 orang
- Pasangan usia subur sebanyak 132.442

PLKB/PKB sebanyak 67 orang melayani 294 desa/kelurahan



No.	Indikator Kinerja	Th 2014	Th 2015
1.	Pelanggaran ijin trayek	33	14
2.	Pelanggaran uji	58	51
3.	Pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya	0	1
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.108	7.228
5.	Kendaraan Bermotor yg di Uji	6.500	10.779
6.	Pelanggaran Kelengkapan Dokumen Kapal	79	52
7.	Jumlah Angkutan Darat	925	1.014
8.	Jumlah penumpang angkutan darat	2.326.694	2.308.680
9.	Kecelakaan di Laut	2	0

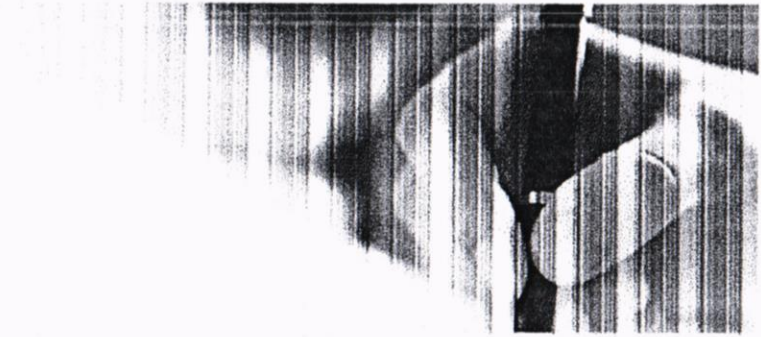


KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa, peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi, serta peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi

[http: rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id) (website milik Pemkab Rembang) dan penyelenggaraan Rembang Expo yg rutin dilaksanakan, diharapkan sebagai media komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan globalisasi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat

PERTANAHAN



Kebijakan daerah dlm penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan.

Sampai dengan tahun 2015 luas lahan yg bersertifikat seluas 979,6 hektar atau sekitar 0,9% dari luas wilayah Kabupaten Rembang (101.408 hektar)

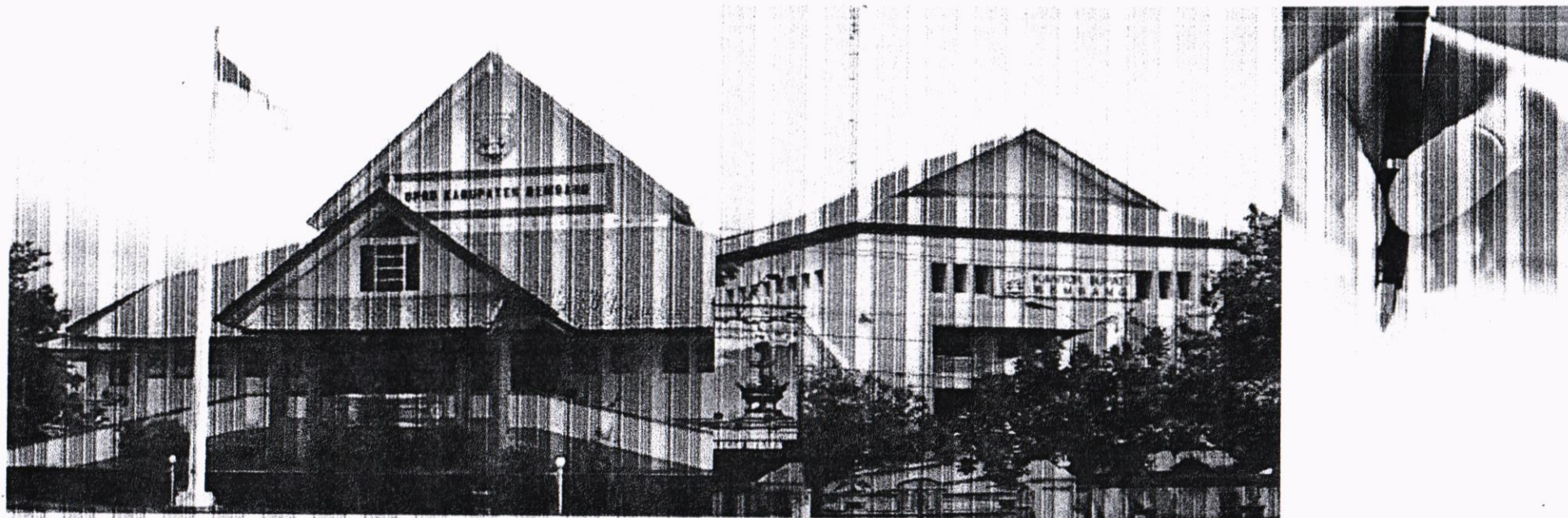
Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya sertifikat tanah diwujudkan dengan sertifikasi PRONA sebanyak 2.000 bidang, sertifikasi PRODA sebanyak 100 bidang dan sertifikasi tanah nelayan sebanyak 100 bidang.



KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DLM NEGERI

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terlihat pada indikator :

- terpeliharanya situasi yg aman dan kondusif pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015
- terwujudnya kemandirian parpol dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat
- meningkatnya fungsi dan peran ormas dalam pembangunan
- meningkatnya kualitas anggota Hansip/Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban masyarakat



OTONOMI DAERAH & PEMERINTAHAN UMUM

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum diarahkan pd upaya :

- terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- harmonisasi hubungan antar kecamatan, desa, maupun kelurahan
- koordinasi pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan
- kerjasama daerah
- koordinasi penegakan HAM serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



DUKUNGAN SARPRAS PEMERINTAHAN

- Produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2015 berupa 6 Perda, 32 Peraturan Bupati, 1.075 Keputusan Bupati
- Jumlah PNS mencapai 8.244 orang
- Alokasi APBD sebesar Rp. 1.650.799.417.663,00,-

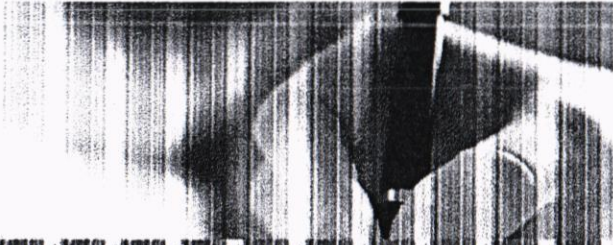


ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH & ASET DAERAH

- Belanja untuk pelayanan dasar mencapai 64 %
- Belanja utk pendidikan & kesehatan sebesar 55 %
- Realisasi belanja APBD terhadap anggaran belanja mencapai 73,84 %
- Realisasi PAD terhadap total pendapatan APBD sebesar 14 %
- Realisasi PAD terhadap potensi (target) PAD mencapai 108 %
- PAD naik 21 % dibandingkan tahun sebelumnya

Perekonomian Daerah

- Distribusi beras miskin (raskin) di Kab. Rembang pd tahun 2015 mencapai 14.492,94 ton beras dengan jumlah penerima sebanyak 69.014 RTSM
- Penyertaan modal sebesar 9,817 milyar rupiah ke beberapa BUMD dan Bank Jateng.
- Deviden yang diterima Pemkab Rembang pada tahun 2015 mencapai 4,4 milyar rupiah.



PENGAWASAN DAERAH

- Pemeriksaan kasus & pemeriksaan khusus sebanyak 108 kasus dan pemeriksaan reguler Kab. Rembang sebanyak 124 obyek pemeriksaan
- Rasio temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti mencapai 79 % (361 selesai dari total rekomendasi sebanyak 453 buah)
- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama 2 tahun terakhir berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP)



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, serta meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat

- PKK aktif mencapai 100% dari jumlah 309 PKK yg ada
- Posyandu aktif mencapai 100% dari jumlah 1.225 posyandu yg ada



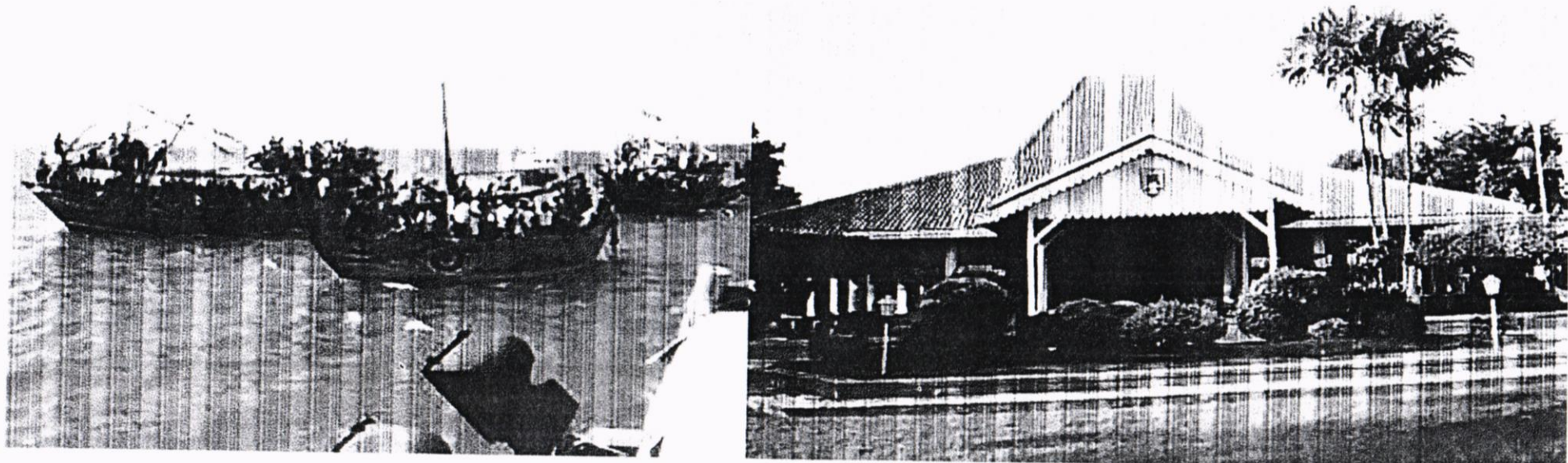
Bidang SOSIAL

- Jumlah sarana sosial berupa panti asuhan, panti jompo & panti rehabilitasi s.d tahun 2015 sebanyak 11 unit
- PMKS yang menerima bantuan mencapai 8.200 orang atau 5,63 % dari 145.683 orang
- Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sejumlah 46 orang atau 0,5 % dari 9.054 yang ada.

BID. KEBUDAYAAN

Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pd upaya meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

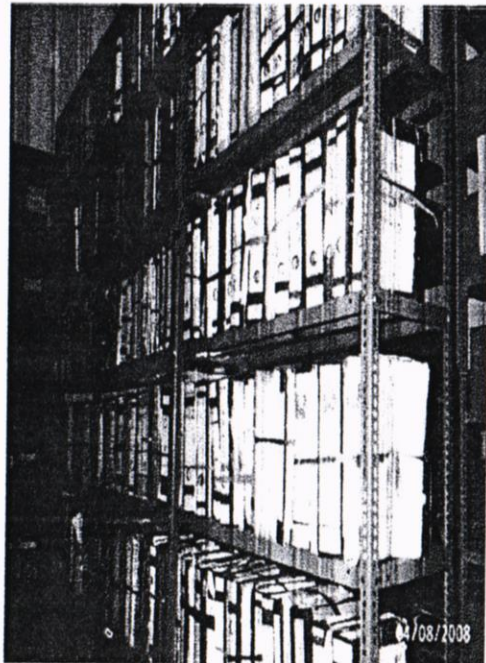
- penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 kali
- benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan sebanyak 47 buah



BIDANG STATISTIK

Dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- Rembang Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka,
- PDRB Kab. Rembang,
- Indikator Sosial Ekonomi,
- Analisis kemiskinan Kabupaten Rembang
- Indek kesejahteraan Petani



BIDANG KEARSIPAN

Program yang dilaksanakan berupa Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Program Pengkajian serta Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

- ✓ Penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD mencapai 30 % (15 dari 49 unit SKPD)
- ✓ Pembinaan petugas pengelola kearsipan sebanyak 24 kali.



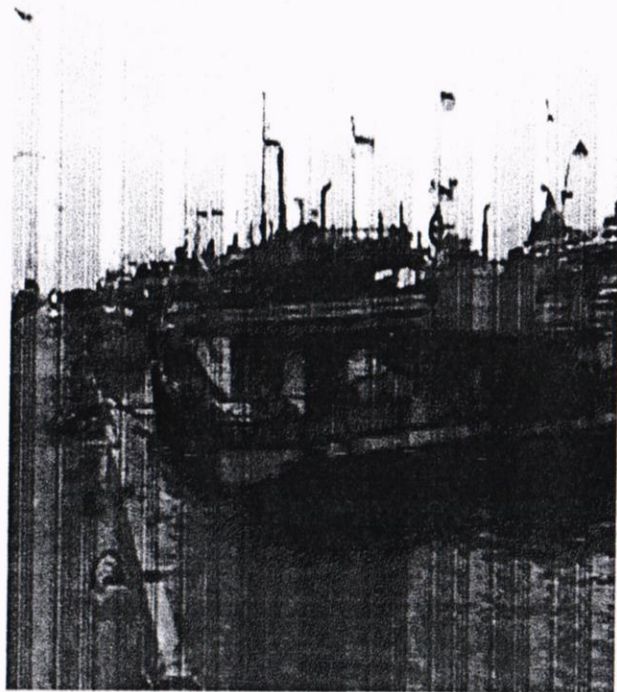
BIDANG PERPUSTAKAAN

- Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 13.791 buah (48,54%) dari jumlah koleksi buku yang tersedia 28.413 buah.
- Pengunjung perpustakaan mencapai 14.199 orang dari jumlah populasi yang harus dilayani 454.394 orang

KELAUTAN & PERIKANAN

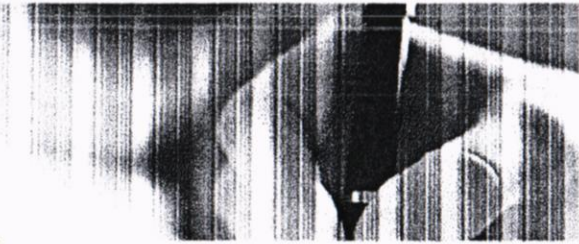
Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan telah dirasakan mengalami perkembangan positif yang terindikasi dari capaian kinerja.

- Produksi perikanan laut mencapai 60.894,2 ton dengan nilai raman Rp. 412,03 milyar serta produksi perikanan darat yg mencapai 7.477,23 ton.



PERTANIAN

No	Produktivitas	Tahun 2015	
		Luas Panen (Ha/Phn)	Produksi (Ton)
1.	Produksi Padi Sawah	38.109	242.494
2.	Produksi Padi Gogo	3.904	13.717
3.	Produksi Jagung	25.659	111.145
4.	Produksi Kedelai	3.675	3.544
5.	Produksi Cabe	4.410	2.228
6.	Produksi Bawang Merah	323	368
7.	Produksi Mangga (phn)	593.723	62.303



KEHUTANAN



Pembangunan di bidang kehutanan diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya peningkatan daya dukung DAS dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensi masyarakat di sekitar hutan.

Pada tahun 2015, luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi mencapai 407,05 hektar atau sekitar 6,73 % dari luas hutan dan lahan kritis (6.051,80 hektar)

Luas kerusakan kawasan hutan secara maksimal dapat ditekan dibawah 0,65 % atau hanya seluas 186,8 hektar dari total luas kawasan hutan yang mencapai 28.644,49 hektar.

ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL



Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kab. Rembang, pada kenyataannya masih menunjukkan kontribusi dalam perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, bahan bakar domestik dan memacu efek berantai ekonomi lain.

Namun demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menarik hampir keseluruhan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke tingkat Provinsi.

Dengan perubahan fundamental dalam kewenangan tersebut, pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah awal dengan upaya meningkatkan efisiensi sektor ESDM disamping terus mencari teknologi dan sumber-sumber energi alternatif yang murah.



PARIWISATA

Upaya mendorong perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menuju era industri pariwisata perlu lebih ditekankan untuk menangkap sejumlah peluang investasi dlm rangka mengoptimalkan penataan obyek wisata, mengatasi kurangnya sarana promosi, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan serta kualitas SDM pariwisata

- jumlah pengunjung obyek wisata mencapai 727.453 orang,
- pendapatan obyek wisata sebesar Rp. 1,064 milyar.



INDUSTRI

- Jumlah industri hingga tahun 2015 mencapai 12.030 unit , tumbuh sebesar 1,67 % dari tahun sebelumnya (11.834 unit).
- Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 20,84 % dengan nilai nominal sebesar Rp. 2,143 trilyun.

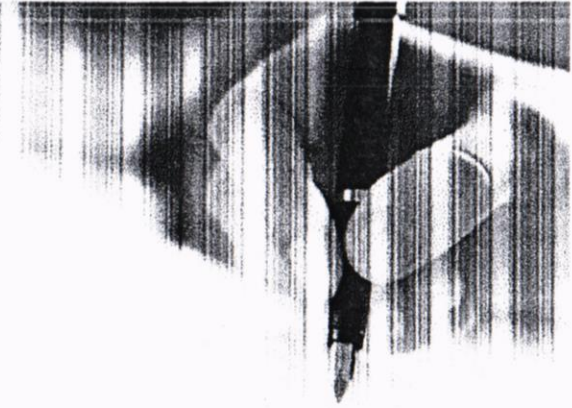
PERDAGANGAN



Kebijakan pembangunan bidang perdagangan diarahkan upaya optimalisasi perdagangan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat sbg konsumen yang dilindungi, pengembangan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional, pengembangan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru, serta pengembangan kapasitas kualitas sarana perdagangan.

Nilai ekspor bersih perdagangan th 2015 mencapai US \$ 22.081.963,75

TRANSMIGRASI



Kebijakan pembangunan bidang transmigrasi diarahkan pada upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.

Pada tahun 2015 dilaksanakan program pengembangan wilayah transmigrasi yg diwujudkan dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta rekrutiring calon transmigran.



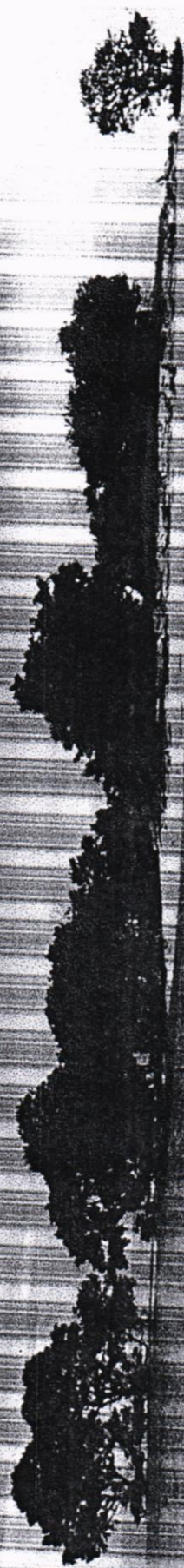
Dengan segenap pencapaian serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, Kita patut berbangga dg berbagai bentuk apresiasi berupa sejumlah penghargaan yg diterima Pemkab Rembang pada tahun 2015 diantaranya :

1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya Tahun 2015 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Presiden Bogor.
2. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2015 untuk Pasar Kragan dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.
3. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI atas prestasi mendorong percepatan penerbitan ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Rembang.



4. Penghargaan Badan Publik Kabupaten/kota Terbaik IV se Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 sebagai Kabupaten Transparansi Informasi Publik di Jawa Tengah
5. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Th 2015 Kategori Kota Kecil Tingkat Nasional.
6. Penghargaan dari Gubernur Jawa tengah atas Keberpihakan terhadap Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Kategori Pratama).

Sekian & Terima Kasih





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

Hari : SENIN
Tanggal : 18 April 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015;
 3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa marilah senantiasa selalu bersyukur kehadiran-Nya, atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin 18 April 2016 kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 6 April 2016, yang menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna ini adalah Penyampaian Usul Rekomendasi dan persetujuan terhadap usul rekomendasi komisi-komisi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 35 orang.

Pasal 80 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menjelaskan bahwa Rapat Paripurna selain Rapat Paripurna untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah, pemberhentian wakil kepala daerah, pemberhentian pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirroh*im” tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat disebutkan bahwa : **LKPJ yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan hasil pembahasan ditetapkan DPRD dengan Keputusan DPRD.**

Merujuk ketentuan tersebut, DPRD Kabupaten Rembang dalam hal ini komisi-komisi DPRD atas dasar jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD, pada tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 telah melakukan pendalaman terhadap LKPJ Bupati Rembang

Akhir Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Rembang dalam rapat paripurna tanggal 12 April 2016. Hasil pendalaman dari masing-masing komisi, nantinya akan dijadikan rekomendasi DPRD kepada Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rembang ke depan.

Untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015;
3. Persetujuan Terhadap Usul Rekomendasi Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Agar dalam penyampaian usul rekomendasi ini dapat berjalan dengan tertib, kepada juru bicara masing-masing Komisi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 1. Komisi A | : Sdr. Eka Siswa Kartika |
| 2. Komisi B | : Sdr. Ali Ircham, S.T |
| 3. Komisi C | : Sdr. H. Chasanuddin |
| 4. Komisi D | : Sdr. Henry Purwoko, S.Pd |

Selanjutnya, secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Komisi A dipersilakan untuk menyampaikan usul rekomendasinya.

**===== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI-KOMISI
DPRD=====**

➤ **(*Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ
Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 terlampir*)**

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Komisi atas penyampaianannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Memasuki acara ketiga yaitu Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi Komisi-Komisi menjadi Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Untuk keperluan tersebut, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam Rapat Paripurna ini :

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu ...!!! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Komisi B dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu...!!! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Komisi C dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu....!!!! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Komisi D dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu !!! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya Rekomendasi tersebut akan dituangkan dengan **Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015**, dan disampaikan kepada Bupati Rembang dalam Rapat Paripurna Istimewa pada tanggal 20 April 2016.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan telah dilaksanakannya penyampaian usul rekomendasi dari masing-masing komisi dan persetujuan terhadap usul rekomendasi menjadi rekomendasi, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

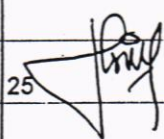
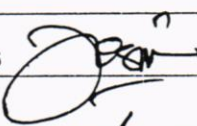
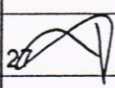
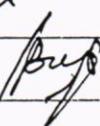
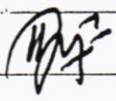
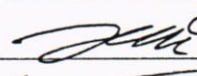
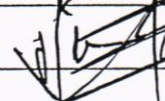
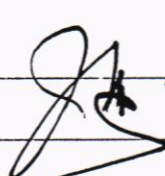
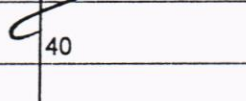
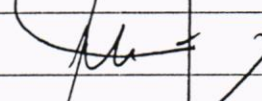
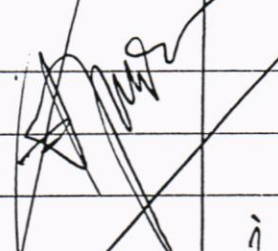
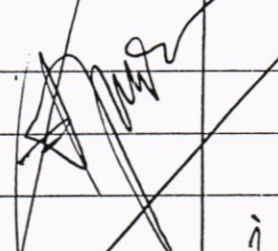
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN
USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI
DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

LAMPIRAN II : Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-
Komisi DPRD Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir
Tahun Anggaran 2015 ;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTRN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI-KOMISI
ATAS LKPJ BUPATI AHKIR TAHUN ANGGARAN 2015
HARI/TANGGAL : SENIN , 18 APRIL 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	✓
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27 	
28	AL IRCHAM, S.T	Anggota	28 	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33 	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35 	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38 	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39 	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40 	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41 	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43 	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	44 	i

Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta Sekretaris DPRD beserta jajarannya.

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang, kami mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Selanjutnya, kami laporkan Hasil Pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang sebagai berikut :

I. Pelaksanaan :

1. Hari : Rabu s/d Jum'at
2. Tanggal : 13 s/d 15 April 2016
3. Tempat : Ruang Komisi A
4. Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 10 orang
5. Pimpinan Rapat : ILYAS/ Ketua Komisi A

II. Hasil Rapat

Komisi A DPRD Kabupaten Rembang setelah melakukan rapat secara maraton memberikan rekomendasi dengan 2 (dua) kategori sebagai berikut :

A. Kategori Umum

Secara Umum Komisi A DPRD Rembang merekomendasikan :

1. Semua kegiatan baik kegiatan pembangunan infrastruktur maupun Hibah bansos yang tertuang di APBD 2015 dan belum bisa direalisasikan harus dianggarkan kembali di APBD

Perubahan 2016 mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sudah lama ditunggu realisasinya oleh mereka. Selain itu dalam estimasi kami, silpa definitif Anggaran tahun 2015 yang akan ditetapkan pada APBD P 2016 masih sangat mampu mengcover kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan tersebut.

2. Bapak Bupati agar mengupayakan keseimbangan distribusi Aparatur atau pegawai di tiap-tiap SKPD, sehingga aparat yang ada pada SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target dari program-program SKPD dengan memperhatikan asas efektif efisien. Jangan ada lagi SKPD yang gagal mencapai target karena terkendala kurangnya pegawai, sementara pada SKPD lain kelebihan pegawai sehingga beban kerjanya rendah bahkan terkesan banyak menganggur.
3. Bapak Bupati harus memacu kinerja seluruh aparatur Pemkab Rembang terutama para pejabat struktural dengan penandatanganan Pakta Integritas kesanggupan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dengan berbagai konsekwensinya.

B. Kategori Khusus

Secara Khusus Komisi A DPRD Rembang merekomendasikan kepada :

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
Dengan keterbatasan personalia yang ada, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang harus mengupayakan lancarnya roda pemerintahan terutama pemerintahan pedesaan baik yang berkaitan dengan pengisian kepala desa dan perangkat desa maupun yang berkaitan dengan keuangan Desa.
2. Badan Lingkungan Hidup
 - a. BLH agar meningkatkan kordinasi penilaian kota sehat sehingga diharapkan Kabupaten Rembang mendapatkan penghargaan Adipura.

b. BLH agar mendesain kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang lebih sistematis untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan ekosistem pantai. Hal ini mengingat tingkat pencemaran dan kerusakan ekosistem pantai di kabupaten Rembang sudah cukup tinggi.

3. Satpol PP

Satpol PP harus lebih meningkatkan fungsinya dalam penegakan perda terutama dalam penertiban tempat-tempat hiburan yang melanggar atau tidak sesuai dan dengan perda Kab. Rembang No.3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

4. Dindikcapil

Dindikcapil agar membuat terobosan kebijakan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kepengurusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil lebih mudah, cepat dan tepat.

Demikian Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang.

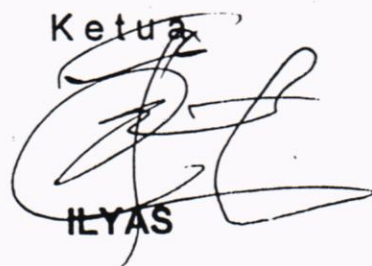
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang, 15 April 2016

KOMISI A
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

Sekretaris



ILYAS

MOHAMMAD ANSHORI

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

PELAKSANAAN :

- a. Jenis rapat : Rapat kerja Komisi B
- b. Tentang : Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015
- c. Hari : Rabu s/d Jumat
- d. Tanggal : 13 s/d 15 April 2016
- e. Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
- f. Tempat : Ruang Komisi B
- g. Di hadir oleh : Pimpinan dan Anggota Komisi B
- h. Pimpinan Rapat : H.HARNO,S.E

HASIL RAPAT dan REKOMENDASI :

Setelah mendalami dan mempelajari atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015, Komisi B DPRD Kabupaten Rembang masih perlu merekomendasikan beberapa hal antara lain sebagaimana berikut :

A. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Penyerapan deviden kurang maksimal pada BUMD khususnya PT. RBSJ. Untuk itu agar PT. RBSJ segera menindak lanjuti hasil RUPS yang mengamanatkan kewajiban PT. RBSJ untuk menyeter deviden kepada Pemkab Rembang.

2. Belum ada kejelasan terkait pengangkatan Direktur Difinitif PDAM. Untuk itu agar Pemkab Rembang segera mengadakan rekrutmen Direktur PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Harus ada langkah proaktif terkait dengan pencairan dana Hibah dan Bansos. Untuk itu Pemkab Rembang harus segera menindaklanjuti kelompok kelompok masyarakat calon penerima Hibah dan Bansos yang telah memenuhi persyaratan secara hukum.
4. Berdasarkan LKPJ Th 2015 (buku 2) disebutkan bahwa angka kemiskinan masih sebesar 20,97% angka ini sangat jauh dibandingkan jumlah rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk itu kedepan Pemkab perlu mengalokasikan anggaran yang lebih dominan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kab. Rembang sesuai dengan MDGs.

B. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Dengan diberlakukanya Permen KP No.2 Th. 2015 yang berisi diantaranya pelarangan Cantrang, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk memperjuangkan nasib para nelayan cantrang.

C. BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

1. Sektor industri pengolahan merupakan sektor penyumbang terbesar pada PDRB setelah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten mendorong melalui regulasi maupun Anggaran agar sektor industri pengolahan menjadi lebih maju.
2. Sektor Pertanian, terkait dengan pendapatan perkapita para petani khususnya dibidang perkebunan, petani tembakau diwilayah 6 enam Kecamatan pinggir laut telah berkurang haknya untuk ikut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Rembang dengan tidak diterimanya hasil tanam tembakau oleh PT. SADANA, oleh sebab itu Pemerintah Kab. Rembang segera menjembatani/memfasilitasi para petani tembakau tersebut untuk mendorong para investor selain PT. SADANA untuk masuk di Kab. Rembang agar terjadi persaingan bebas dan kompetitif.
3. Sering terjadi inflasi yang disebabkan oleh pengaruh naiknya harga cabe, bawang dan holtikultura yang lain. Untuk itu Pemkab Rembang segera membuat lumbung holtikultura serta BUMD untuk menjamin pembelian hasil panen holtikultura.

4. Disektor Pertanian diketahui bahwa hasil panen selama ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal, banyak juga terjadi gagal panen akibat ketergantungannya petani terhadap curah hujan. Untuk itu agar Pemkab Rembang agar memperbanyak pembangunan embung dan cekdam yang standard dan berkualitas diberbagai wilayah pertanian yang berpotensi mendorong hasil panen.

PENUTUP

Demikian hasil laporan pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD Kab. Rembang tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015.

WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

REMBANG, 15 April 2016
KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H.HARNO,S.E

Sekretaris,


ALI IRCHAM, S.T

LAPORAN HASIL PENYUSUNAN
REKOMENDASI KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI REMBANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015
KOMISI : C

A. Pelaksanaan :

1. Dasar : Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 April 2016
2. Hari/ Tanggal : Rabu s/d Jum'at, tanggal 13 s/d 15 April 2016
3. Tempat : Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Rembang
4. Hadir dalam Rapat : - Pimpinan dan anggota Komisi C : 9 orang
5. Pimpinan Rapat : WIDODO

B. Hasil Rapat :

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 dapat dipahami, namun perlu direkomendasi sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan sampai dengan proses penganggaran harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku termasuk perhitungan waktunya.
2. Perencanaan pembangunan dengan realisasi kegiatan harus disinkronkan, agar menghasilkan arah pembangunan yang sesuai dengan rencana yang dicapai.
3. Perencana pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum harus ditunjuk personil yang betul- betul menjiwai seorang perencana sehingga bisa menghasilkan program yang tepat guna dan berhasil guna.
4. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta meningkatkan kualitas jalan poros antar Kecamatan (berhotmix / beton) disesuaikan dengan kondisi masing- masing daerah.
5. Diharapkan pada Bidang Sumber Daya Air supaya direncanakan program terobosan yang sesuai dengan situasi Kabupaten Rembang yang tadah hujan dan sangat terbatasnya curah hujan , (misalnya dengan membuat cek dam/ bendung kecil didaerah aliran sungai sebanyak mungkin).
6. Perlu adanya penambahan armada truck sampah untuk kelancaran pengangkutan sampah.
7. Honor Tenaga Harian Lepas di DPU (Bidang Persampahan) agar ditingkatkan kesejahteraanya (minimal setara dengan upah UMK) agar lebih semangat dalam menjalankan tugas sehari- hari.
8. Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Persampahan serta Gorong- Gorong pada Dinas Pekerjaan Umum agar dijadikan satu Dinas tersendiri karena beban pekerjaan yang sangat besar dan keterbatasan jumlah pegawai, sehingga masing- masing dapat bekerja lebih maksimal.

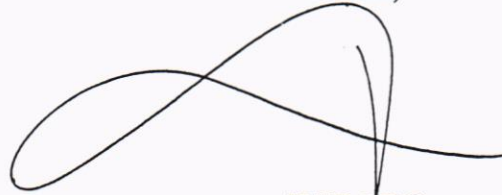
9. Untuk mempercepat penanganan kebakaran diseluruh wilayah Kabupaten Rembang agar mobil pemadam kebakaran, personil dan beserta peralatannya ditambah dan ditempatkan di tiga wilayah Kabupaten Rembang (barat, tengah dan timur).
10. Untuk mempermudah kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka penanganan kebakaran yang semula berada di Dinas Pekerjaan Umum agar dimasukkan menjadi tugas BPBD dengan mengubah Perda SOTK.
11. Melihat dari Buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015, dilaporkan bahwa jalan dalam keadaan baik mencapai (44,96 %) atau sepanjang 288,9 km dan menurut pengamatan/ pantauan Komisi C hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena rata-rata hampir semua ruas jalan di Kabupaten Rembang rusak parah. Untuk itu mohon dalam membuat laporan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.
12. Di dalam Buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015, dilaporkan ada pembangunan, pemeliharaan jembatan tetapi menurut pantauan Komisi C di lapangan pada Tahun 2015 tidak ada pembangunan/ pemeliharaan jembatan. Untuk itu mohon dalam membuat laporan, dilaporkan apa adanya atau sesuai dengan realita yang ada.
13. Mengingat situasi tahun anggaran 2015 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rembang tidak berjalan atau macet. Untuk hal tersebut mohon Pemkab Rembang/ Saudara Bupati untuk bisa menggerakkan SKPD – SKPD terkait supaya berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan hasil rapat Komisi C dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 dan selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 pada Rapat Paripurna Istimewa tanggal 20 April 2016.

Rembang, 15 April 2016

KOMISI C
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



WIDODO

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
 Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta
 Staf.

Sebelum kami bacakan laporan hasil pembahasan dari Komisi D pada hari ini, marilah sejenak kita menunduk, bertafakur seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya, atas semua limpahan rohmah, nikmat dan hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa (Amiin ya robbal alamin).

Selanjutnya Komisi D DPRD Kabupaten Rembang akan melaporkan hasil rapat sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah
2. Hari / Tanggal : Rabu s/d Jum'at, 13 s/d 16 April 2015
3. Tempat : Ruang Komisi D
4. Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi D
5. Pimpinan Rapat : Henry Purwoko, S.Pd (Ketua Komisi D)

B. HASIL RAPAT

Setelah mendalami, mempelajari dalam pembahasan rapat komisi atas LKPI Tahun Anggaran 2015, maka Komisi D DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

1. Dengan adanya Undang – undang no 30 Tahun 2014 dan dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016, hal ini semangat yang kita lihat dari pemerintah adalah agar tidak adanya silpa yang terlalu tinggi dan diharapkan tingkat penyerapan yang maksimal terhadap anggaran negara untuk itu semangat ini harus bisa ditangkap oleh Pemda agar tidak ada keraguan lagi menjalankan program-program yang telah ditetapkan asal sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
2. Terkait dengan anggaran DAK yang ada di Dinas Pendidikan pada tahun 2015 kemarin tidak bisa terlaksanakan semua dan juga silpa DAK pada tahun sebelum sebelumnya kami meminta Pemkab untuk mengupayakan bisa ditarik kembali ke Kabup[atun Rembang, dengan segera membentuk Tim khusus tentang DAK dan menyiapkan perencanaan secepatnya selanjutnya dimohonkan izin kepada kementerian.
3. Terkait dengan DAK kami minta pada Dinas Pendidikan untuk berani melaksanakan dengan mengacu dengan peraturan yang berlaku. Dan apabila Dinas tidak berani menjalankan DAK kami meminta Pejabat yang Terkait untuk mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral

pada jabatannya, atau kami mohon Bapak Bupati untuk memberi sanksi tegas terhadap Pejabat terkait yang tidak melaksanakan program-program dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bidang Kesehatan

1. Terakait dengan program BLUD di masing masing Puskesmas Kab. Rembang kami minta DKK untuk mengawal secara serius, mengevaluasi secara berkala terhadap kemampuan dan kesiapan Puskesmas puskesmas dalam menjalankan program BLUD apabila dianggap tidak mampu menjalankan program tersebut kami merekomendasikan untuk ditinjau ulang kebijakan BLUD pada puskesmas.
2. Melihat kejadian DBD tahun 2015 diatas ambang normal dan sudah menelan korban jiwa kami meminta DKK kerjasama dengan Desa dan Instansi terkait untuk menyiapkan antisipasi pada tahun 2017 agar tidak terjadi hal yang sama.
3. Untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUD dr. R Soetrasno Rembang dimohon RSUD dr. R. Soetrasno lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu obat, sehingga pasien merasa puas terhadap pelayanan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
4. Terkait dengan pelayanan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang kami meminta pihak manajemen untuk

meningkatkan Standar Pelayanan. Dan mengevaluasi kinerja karyawan Rumah sakit terhadap pelayanan pasien, kalau dibandingkan dengan RS Swasta yang favorite sekalipun penghasilan karyawan RSUD tidak kalah dan bahkan lebih tinggi, tetapi ironisnya ditingkat pelayanan kita kalah dengan RS swasta.

5. Semakin meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rembang Komisi D merekomendasikan agar RSUD dr. R. Soetrasno untuk menyediakan fasilitas khusus untuk penderita HIV/AIDS dan penyediaan obat khusus untuk penderita HIV/AIDS.

c. Bidang Pariwisata

1. Untuk memajukan potensi wisata Rembang dan menjadikan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Unggulan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wabup Rembang, maka perlu evaluasi dan sinkronisasi kinerja antar bidang pada Dinbudparpora Rembang.
2. Banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang yang masih belum dikembangkan diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkat industri pariwisata yang ada di Rembang dan berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor pariwisata.
3. Agar pemerintah daerah mengevaluasi sistem promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang baik promosi yang berskala Nasional maupun promosi yang berskala internasional, dan menggandeng pihak ketiga yang

profesional untuk dapat mencari terobosan untuk mengangkat pariwisata Kabupaten Rembang, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

4. Diharapkan pemerintah daerah memberi ruang kepada generasi muda untuk membuka industri kreatif.
5. Untuk meningkatkan prestasi di bidang olah raga sampai tingkat Nasional agar pemerintah daerah meningkatkan fasilitas olah raga dan menghidupkan olah raga yang ada tingkat di Kecamatan, sehingga akan memunculkan bibit-bibit atlet yang berprestasi.

d. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1. Semakin meningkatnya investasi yang ada di Kabupaten Rembang yang bisa dilihat dari makin banyak perusahaan-perusahaan, agar pemerintah daerah dapat menggali potensi CSR dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di lokasi sekitarnya.
2. Diharapkan pemerintah daerah memperbanyak pelatihan kerja khususnya kepada kaum muda, sehingga apabila ada permintaan tenaga kerja dari perusahaan dapat menyediakan tenaga kerja yang siap pakai.
3. Melalui dinas sosial agar pemerintah daerah melakukan pendataan orang miskin secara valid dan lebih cermat, sehingga setiap ada program yang berkaitan dengan

masalah sosial dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

4. Dinsosnakertrans Rembang untuk dapat memantau perekrutan tenaga kerja pada perusahaan – perusahaan yang ada di Rembang demi terserapnya putra-putri daerah bekerja dalam perusahaan , sebagai contoh yang kita lihat bahwa pada Semen Indonesia tenaga kerjanya lebih banyak yang berasal dari luar Rembang.

e. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

1. Agar pemerintah daerah mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang.
2. Agar semua SKPD dapat berkoordinasi terkait tentang kearsipan, sehingga arsip-arsip yang penting dapat disimpan digedung arsip daerah.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberikan fasilitas perpustakaan yang memadai baik di Kecamatan maupun di desa, sehingga dapat meningkatkan budaya baca pada masyarakat.

C. PENUTUP

Demikian Laporan yang kami sampaikan atas hasil rapat internal Komisi D DPRD Kabupaten dalam menyusun rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015,

yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD
tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015.

Rembang, 18 April 2016
KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG

K e t u a

Sekretaris



HENRY PURWOKO, S.Pd

ISLAHUDDIN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS
LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015**

Hari : RABU
Tanggal : 20 April 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pembacaan Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015;
 3. Penyerahan Rekomendasi secara Simbolis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. GUNASIH, S.E
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	: 6 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Instansi, Kantor, Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan undangan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mengawali rapat paripurna marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan taufiq dan rahmat-Nya sehingga kita dapat kembali bertemu di ruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 dengan agenda pokok **Pembacaan Keputusan DPRD Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.**

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan

menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 36 orang. Sehubungan Rapat Paripurna Istimewa tidak mengambil keputusan, di mana dalam pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota DPRD yang hadir, maka dengan mengucap "*Bismillaahirrohmaanirrohiim*" tepat pukul 11. 10 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna istimewa hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015;
3. Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
4. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu **Pembacaan Salinan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015** yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.

Kepada Saudara Drs. ACHMAD MUALIF dipersilahkan.

**====PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015=====**

- *(Salinan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 terlampir)*

Terima kasih Sdr. Drs. ACHMAD MUALIF atas pembacaannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mendengar pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa saran, masukan, himbauan, maupun koreksi yang merupakan Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang atas pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2015. Keputusan DPRD tentang rekomendasi tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Rembang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang kedepan, sehingga akan menjadi lebih baik sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat.

Marilah kita masuki acara ketiga yaitu Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015.

Untuk keperluan tersebut, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi. Dipersilahkan.

**==== PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD KEPADA BUPATI
DIPANDU OLEH SEKRETARIS DPRD =====**

Terimakasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya penyerahan Keputusan DPRD kepada Bupati.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

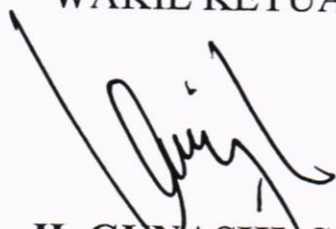
Acara dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesailah sudah Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat. Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

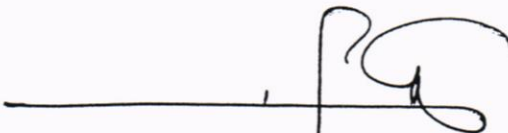
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

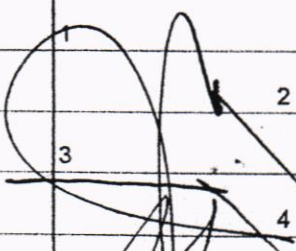
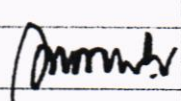
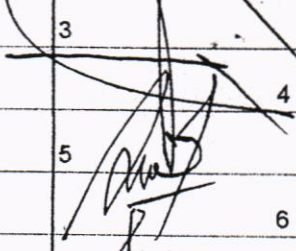
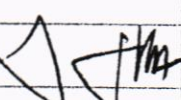
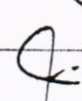
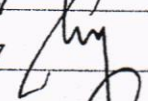
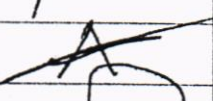
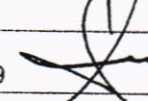
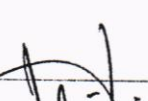
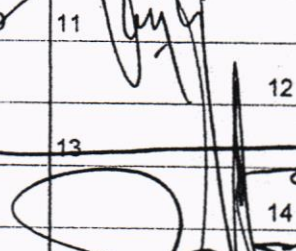
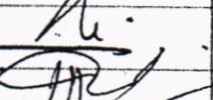
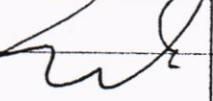
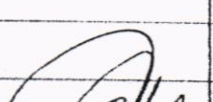
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2015;

**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AHKIR T.A 2015**

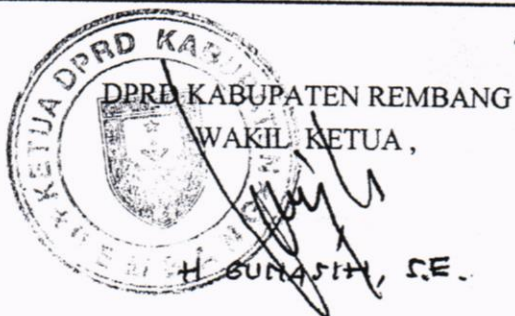
**HARI/TANGGAL : RABU , 20 APRIL 2016
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		DL
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3 	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13 	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17 	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18 	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22 	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	5
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	1
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	

Ceterangan :

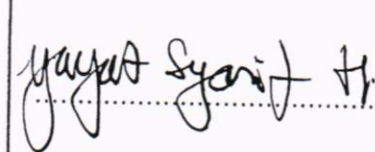
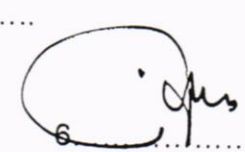
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
 RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AHKIR T.A 2015

HARI/TANGGAL : RABU, 20 APRIL 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.....
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.....
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5		Dandim 0720 Rembang	5.....
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.....
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 

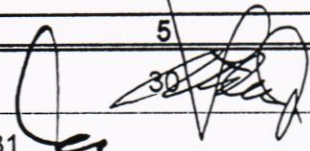
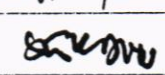
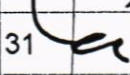
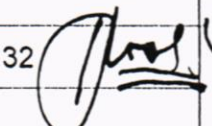
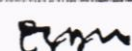
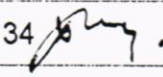
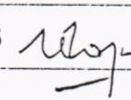
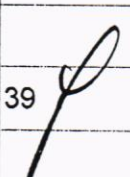
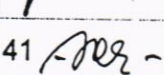
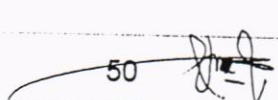


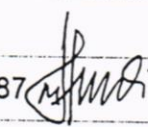
DRS. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AHKIR T.A 2015

HARI/TANGGAL : RABU, 20 APRIL 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Nov Effendi	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Ixwawi		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	PHAN ON		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautard		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Gautard		12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN			15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	Her Dendawati	Seher	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	HGATIHI	Seher	20
21	B K D	IRARSON U		21
22	BKP & P4K	Dwi Purwanto	Repele	22
23	B P B D	nyan	Seher	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	Priyo Utomo	Seheret	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Nov effendi	Plt kedis	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Suratmin	Dintanhut	28
29	DINLUTKAN	Maria		29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	Iqbal Sulaksana	Kasi Teknis	30 
31	DINAS DUKCAPIL	MUGROHO HS		31 
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO	KADIS	32 
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryono		34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	PURWADI S	ka.	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka Kurbj	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR KPPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	H. YU KORO EKO S		39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41 
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	ARI LISTON		45 
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Tri Mulyani	Kemenag	50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)	NOTO	KEPALA	63 U
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		KUS	FICS	95 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AHKIR T.A 2015

HARI/TANGGAL : RABU, 20 APRIL 2016

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	<i>Fenak Kusuryo</i>	1 <i>[Signature]</i>
2	CAMAT KALIORI	<i>MUSTHOLIH</i>	2 <i>[Signature]</i>
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	<i>SUSANTORO</i>	5 <i>[Signature]</i>
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	<i>SUBHAN</i>	8 <i>[Signature]</i>
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN	<i>Iswanto</i>	11 <i>[Signature]</i>
12	CAMAT SLUKE	<i>Subhan</i>	12 <i>[Signature]</i>
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14 <i>[Signature]</i>



KATARS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620304 198803 1 011



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;

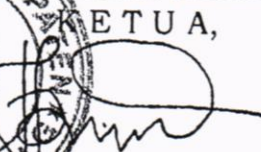
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Internal Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 18 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditindaklanjuti.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,

H. MAJID KAMIL.MZ



REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

Berdasarkan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 18 April 2016 dan rapat-rapat pembahasan internal yang dilakukan, DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi -rekomendasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Rembang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan agar lebih baik , sebagai berikut :

I. BIDANG PENDIDIKAN

1. Diharapkan Pememerintah Kabupaten Rembang dapat meningkatkan penyerapan anggaran secara maksimal dan tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan sehingga silpa yang terlalu tinggi dapat ditekan dengan merujuk Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015.
2. Pememerintah Kabupaten Rembang diminta mengambil langkah-langkah guna mengupayakan penarikan kembali anggaran DAK pada Dinas Pendidikan pada tahun 2015 yang tidak bisa dilaksanakan dan silpa anggaran DAK pada tahun sebelumnya, dengan segera membentuk Tim khusus tentang DAK guna menyiapkan perencanaan yang selanjutnya dimohonkan izin kepada kementerian secepatnya.
3. DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang berani melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang tidak berani menjalankan kegiatan bersumber dari anggaran DAK tanpa didasari alasan yang jelas lebih baik mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral pada jabatannya. DPRD juga mengharap Bupati tidak segan-segan memberi sanksi tegas terhadap Pejabat terkait yang tidak

melaksanakan program-program dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

II. BIDANG KESEHATAN

1. DKK diharap mengawal secara serius, mengevaluasi secara berkala terhadap kemampuan dan kesiapan puskesmas puskesmas dalam menjalankan program BLUD. Apabila ternyata dianggap tidak mampu menjalankan program tersebut, DPRD merekomendasikan untuk ditinjau ulang kebijakan BLUD pada puskesmas.
2. Melihat kejadian DBD tahun 2015 di atas ambang normal dan sudah menelan korban jiwa, DPRD meminta DKK kerjasama dengan Desa dan Instansi terkait untuk menyiapkan antisipasi pada tahun 2016 agar tidak terjadi hal yang sama.
3. Untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap mutu pelayanan, RSUD dr. R Soetrasno Rembang dimohon lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu obat, sehingga pasien merasa puas terhadap pelayanan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
4. Kami meminta pihak manajemen RSUD dr. R. Soetrasno Rembang untuk lebih meningkatkan Standar Pelayanan, mengevaluasi kinerja karyawan Rumah sakit terhadap pelayanan pasien. Hal ini menjadi penting mengingat jika dibandingkan dengan RS Swasta favorit sekalipun penghasilan karyawan RSUD tidak kalah dan bahkan lebih tinggi, tetapi ironisnya dalam hal pelayanan, RSUD masih kalah dengan RS swasta.
5. RSUD dr. R. Soetrasno untuk menyediakan fasilitas khusus untuk penderita HIV/AIDS dan penyediaan obat khusus untuk penderita HIV/AIDS terkait Semakin meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rembang.

III. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang dengan keterbatasan personalia yang ada, harus mampu mengupayakan kelancaran roda pemerintahan terutama

pemerintahan pedesaan baik yang berkaitan dengan pengisian kepala desa dan perangkat desa maupun yang berkaitan dengan keuangan Desa.

IV. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Tahapan perencanaan sampai dengan proses penganggaran harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku termasuk perhitungan waktunya.
2. Perencanaan pembangunan dengan realisasi kegiatan harus disinkronkan, agar menghasilkan arah pembangunan yang sesuai dengan rencana yang dicapai.
3. Perencana pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum harus ditunjuk personil yang betul- betul mampu menjiwai seorang perencana sehingga bisa menghasilkan program yang tepat guna dan berhasil guna.
4. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta meningkatkan kualitas jalan poros antar Kecamatan (berhotmix / beton) disesuaikan dengan kondisi masing- masing daerah.
5. Diharapkan pada Bidang Sumber Daya Air agar merencanakan program terobosan yang sesuai dengan situasi Kabupaten Rembang yang tadah hujan dan sangat terbatasnya curah hujan , (misalnya dengan membuat cek dam/ bendung kecil didaerah aliran sungai sebanyak mungkin).
6. Perlu adanya penambahan armada truck sampah untuk kelancaran pengangkutan sampah.
7. Honor Tenaga Harian Lepas di DPU (Bidang Persampahan) agar ditingkatkan kesejahteraanya (minimal setara dengan upah UMK) agar lebih semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8. Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Persampahan serta Gorong-Gorong pada Dinas Pekerjaan Umum agar dijadikan **satu Dinas** karena beban pekerjaan yang sangat besar dan keterbatasan jumlah pegawai, sehingga masing- masing dapat bekerja lebih maksimal.
9. Melihat dari Buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015, dilaporkan bahwa jalan dalam keadaan baik mencapai (44,96 %) atau sepanjang 288,9 km tersebut tidak

sesuai dengan fakta dilapangan karena rata-rata hampir semua ruas jalan di Kabupaten Rembang rusak parah. Untuk itu mohon dalam membuat laporan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.

10. Di dalam Buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2015, dilaporkan ada pembangunan, pemeliharaan jembatan di lapangan pada Tahun 2015 tidak ada pembangunan/pemeliharaan jembatan. Untuk itu mohon dalam membuat laporan, dilaporkan apa adanya atau sesuai dengan realita yang ada.
11. Mengingat situasi tahun anggaran 2015 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rembang tidak berjalan atau macet. Kami mohon Pemkab Rembang/ Saudara Bupati untuk bisa menggerakkan SKPD-SKPD terkait supaya berjalan sebagaimana mestinya.

V. BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRASMIGRASI

1. Semakin meningkatnya investasi di Kabupaten Rembang yang bisa dilihat dari makin banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, diharapkan pemerintah daerah dapat menggali potensi CSR dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di lokasi sekitar.
2. Diharapkan pemerintah daerah dapat memperbanyak pelatihan kerja khususnya kepada kaum muda, sehingga apabila ada permintaan tenaga kerja dari perusahaan dapat menyediakan tenaga kerja yang siap pakai.
3. Pemerintah daerah untuk melakukan pendataan orang miskin secara valid dan lebih cermat melalui Dinas Sosial, sehingga setiap ada program yang berkaitan dengan masalah sosial dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
4. Dinsosnakertrans Rembang untuk selalu memantau perekrutan tenaga kerja pada perusahaan - perusahaan yang ada di Rembang demi terserapnya putra-putri daerah dapat bekerja dalam perusahaan, sebagai contoh yang kita lihat

bahwa pada Semen Indonesia tenaga kerjanya lebih banyak yang berasal dari luar Rembang.

VI. BIDANG PARIWISATA

1. Untuk memajukan potensi wisata Rembang dan menjadikan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Unggulan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wabup Rembang, maka perlu evaluasi dan sinkronisasi kinerja antar bidang pada Dinbudparpora Rembang.
2. Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkat industri pariwisata yang ada di Rembang dan berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor pariwisata dikarenakan banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang yang belum dikembangkan diharapkan.
3. Pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang baik promosi yang berskala Nasional maupun promosi yang berskala internasional, dengan menggandeng pihak ketiga yang profesional untuk dapat mencari terobosan demi mengangkat pariwisata Kabupaten Rembang.
4. Diharapkan pemerintah daerah memberi ruang kepada generasi muda untuk membuka industri kreatif.
5. Pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan fasilitas olah raga dan menghidupkan olah raga yang ada tingkat di Kecamatan, sehingga akan memunculkan bibit-bibit atlet yang berprestasi sampai tingkat Nasional.

VII. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dengan diberlakukanya Permen KP No.2 Th. 2015 yang berisi diantaranya pelarangan cantrang, diharapkan Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan nasib para nelayan cantrang.

VIII. BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

1. Sektor industri pengolahan merupakan sektor penyumbang terbesar pada PDRB setelah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten mendorong

melalui regulasi maupun Anggaran agar sektor industri pengolahan menjadi lebih maju.

2. Terkait dengan pendapatan perkapita para petani, khususnya dibidang perkebunan, petani tembakau diwilayah 6 enam Kecamatan pinggir laut seperti Kec. Kaliori, Kec. Rembang, Kec. Lasem, Kec. Sluke , Kec. Kragan dan Kec. Sarang telah berkurang haknya untuk ikut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Rembang dengan tidak diterimanya hasil tanam tembakau oleh PT. SADANA, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Rembang segera menjembatani / memfasilitasi para petani tembakau tersebut untuk mendorong para investor selain PT. SADANA untuk masuk di Kab. Rembang agar terjadi persaingan bebas dan kompetitif.
3. Sering terjadi inflasi yang disebabkan oleh pengaruh naiknya harga cabe, bawang dan hortikultura yang lain. Untuk itu Pemkab Rembang segera membuat lumbung hortikultura serta BUMD untuk menjamin pembelian hasil panen hortikultura.
4. Disektor Pertanian diketahui bahwa hasil panen selama ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal, banyak juga terjadi gagal panen akibat ketergantungannya petani terhadap curah hujan. Untuk itu agar Pemkab Rembang agar memperbanyak pembangunan embung dan cekdam yang standar dan berkualitas diberbagai wilayah pertanian yang berpotensi mendorong hasil panen.

IX. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dindukcapil agar membuat terobosan kebijakan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kepengurusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil lebih mudah, cepat dan tepat

X. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Untuk mempercepat penanganan kebakaran diseluruh wilayah Kabupaten Rembang agar mobil pemadam kebakaran, personil dan beserta peralatannya ditambah dan ditempatkan di tiga wilayah Kabupaten Rembang (barat, tengah dan timur).

2. Untuk mempermudah kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka penanganan kebakaran yang semula berada di Dinas Pekerjaan Umum agar dimasukkan menjadi tugas BPBD dengan mengubah Perda SOTK.

XI. BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Agar pemerintah daerah mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang.
2. Agar semua SKPD dapat berkoordinasi terkait tentang kearsipan, sehingga arsip-arsip yang penting dapat disimpan digedung arsip daerah.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberikan fasilitas perpustakaan yang memadai baik di Kecamatan maupun di desa, sehingga dapat meningkatkan budaya baca pada masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ

